

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM POJOK BACA DIGITAL (POCADI)
DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT KOTA
MALANG**
(Studi pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)

Sukir Ahmad¹, Slamet Muchsin², Septina Dwi Rahmawati³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: sukirah140402@gmail.com*

ABSTRAK

Tingkat minat baca masyarakat Kota Malang mengalami tren yang terus meningkat secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan budaya literasi. Program POCADI yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sudah aktif dan berkontribusi terhadap peningkatan ketertarikan membaca masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Kota Malang setiap tahunnya. Namun, di pihak lain, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah masalah dalam proses implementasinya, seperti adanya komputer yang mengalami error, sikap petugas yang kurang responsif dalam membantu pengunjung, serta kondisi kebersihan ruang baca yang kurang terjaga sehingga mempengaruhi kenyamanan pengguna. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik, pelaksanaan di lapangan masih memiliki kendala pada aspek sumber daya, disposisi pelaksana, dan pengelolaan fasilitas. Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang deskriptif, di mana informasi dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk secara langsung menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, petugas POCADI, serta masyarakat dan mahasiswa sebagai pengguna layanan. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas, aktivitas pelayanan, serta situasi nyata di lokasi POCADI. Dokumentasi juga digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, arsip, dan laporan yang relevan dengan penelitian. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang berusaha supaya kebijakan program pojok baca digital dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan melakukan penyediaan fasilitas seperti komputer wifi serta peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh seorang penjaga POCADI tersebut. Serta setelah dilaksanakan program Pojok Baca Digital (POCADI) pada tahun 2022, tingkat literasi masyarakat mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya menunjukkan keberhasilan program ini dalam memperluas akses dan ketertarikan baca masyarakat melalui layanan digital.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, dan Literasi Digital, Minat Baca, Pocadi

Pendahuluan

Membaca adalah mengirim atau memindahkan data dari sebuah bacaan menjadi informasi kemudian diolah menjadi pengetahuan yang dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang yang nantinya diterapkan menjadi sebuah kebijakan (Prianto, 2020). Menurut Wulan membaca menjadi salah satu aspek sangat krusial dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kemampuan membaca menjadi hal yang sangat vital karena berita dan informasi di dunia saat ini disampaikan melalui teks. dan hal itu hanya bisa diakses melalui aktivitas membaca. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan membaca, maka ia tidak akan mengerti panduan atau informasi yang ada, sehingga individu tersebut berisiko mengalami keterlambatan, mengambil keputusan yang salah, atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

D. Krashen, (2004). mengungkapkan dalam buku yang berjudul *The Power of Reading: Insights from the Research*, kegiatan membaca bisa menumbuhkan kemampuan dan persepsi bahasa, mengembangkan daya pikir dan sarana terbuka terhadap pemahaman yang lebih luas. Dalam situasi pendidikan, membaca adalah hal yang sangat fundamental untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Manning (2011) dalam *The Importance of Reading in Education* menyatakan bahwasanya membaca dapat menambah keterampilan berbahasa dan kognitif, mengembangkan imajinasi dan menambah ilmu pengetahuan yang luas. Budaya membaca yang kuat akan menciptakan masyarakat yang cerdas dan kreatif. Sebuah negara dengan orang-orang yang suka membaca

memiliki kesempatan untuk menghasilkan ide yang baru, meningkatkan kualitas penelitian dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi dan industri kreatif.

Pendidikan sebagai langkah pertama menuju kemajuan tidak akan berjalan efektif tanpa kesadaran akan nilai penting membaca dan menulis. Saat ini, negara sedang menghadapi situasi darurat dalam bidang pendidikan. Generasi muda cenderung melihat aktivitas membaca dan menulis sebagai sesuatu yang remeh, yang mengakibatkan Indonesia terjerumus dalam berbagai masalah, seperti masalah moral, kepemimpinan, dan generasi penerus bangsa. Kebiasaan membaca dan menulis di antara warga negara Indonesia masih belum begitu kuat, dan masyarakat lebih memilih mendengarkan daripada terlibat dalam membaca dan menulis. hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat dianggap sebagai masyarakat maju. (Romadhon, 2020).

Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, ada beberapa pertanyaan yang harus diulas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Dispusipda Kota Malang untuk mendorong minat baca warga Kota Malang?
2. Bagaimana model implementasi kebijakan program pojok baca digital?

Tujuan Penelitian

1. Mempelajari, menjelaskan, dan menganalisis apa saja yang dilakukan Dispusipda Kota Malang untuk meningkatkan minat baca warga Kota Malang.
2. Meneliti, menjelaskan, dan menganalisis mengenai bagaimana cara penerapan kebijakan program pojok baca digital.

Manfaat

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis memberikan inovasi hingga solusi baru untuk Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, serta memperluas pengetahuan peneliti dan masyarakat tentang penerapan kebijakan POCADI dalam usaha mendorong peningkatan budaya membaca warga di Kota Malang.

2. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan berkontribusi sebagai pedoman untuk studi selanjutnya. Hasil dari penelitian ini juga bisa berfungsi sebagai sumber informasi untuk kajian yang akan dilakukan di masa depan dengan topik yang serupa.

- b) Bagi Dinas

Studi ini diharapkan dapat memberikan ide-ide baru bagi Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang terkait pelaksanaan kebijakan POCADI untuk mendorong tumbuhnya budaya baca masyarakat di Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Frenklin Implementasi kebijakan adalah serangkaian dari proses kebijakan sesudah ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Pressman dan Wildavsky (dalam Handoyo 2012:94) Memahami pelaksanaan kebijakan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan, memenuhi komitmen yang dijelaskan dalam dokumen kebijakan, untuk menciptakan hal-hal yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan, serta untuk memenuhi misi yang perlu direalisasikan sesuai dengan yang tercantum dalam tujuan kebijakan.

Warwick dalam (Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti 2012) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan pertukaran sumber daya. Untuk melaksanakan sebuah program, pelaksana perlu berhubungan dengan tanggung jawab, kondisi, pengguna, dan kelompok yang terkait. Grindle (dalam Handoyo 2012:95) menjelaskan bahwa fusi implementasi adalah menciptakan sebuah korelasi yang dapat memudahkan tujuan kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan diharuskan mengacu dengan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah harus mengkomunikasikan dan mendukung pencapaian sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan kesalahan dalam penilaian kebijakannya.

Van Meter dan Van Horn (Handoyo, 2012) mengungkapkan pelaksanaan kebijakan merupakan berbagai rangkaian kegiatan yang diambil oleh berbagai pihak dalam rangka untuk mewujudkan sasaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan didalamnya termasuk realisasi keputusan menjadi kenyataan dalam rentang waktu tertentu serta upaya untuk tetap berusaha dalam mewujudkan perubahan yang ditetapkan oleh kebijakan yang ada.

Dari berbagai sudut pandang yang ada, disimpulkan pelaksanaan kebijakan merupakan langkah untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, dengan tujuan untuk mencapai hasil dari kebijakan tersebut.

Indikator Implementasi Kebijakan

Teori pelaksanaan kebijakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, seperti yang diungkapkan oleh Kasmad (2013), menguraikan enam elemen pelaksanaan kebijakan yang saling berhubungan dan berperan dalam proses kebijakan publik, diantaranya:

1. **Standar dan Target Kebijakan.** Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ditentukan dari standar serta sasaran kebijakan itu sendiri. Indikator keberhasilan dan sasaran harus ditentukan dengan jelas hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan sudut pandang antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Apabila ada perbedaan tafsiran hal ini akan menjadi faktor dari kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. **Sumber Daya.** Sumber daya memiliki peran yang penting dalam mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Terdapat beberapa sumber daya yang dimaksud untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang meliputi dana, materi, tenaga kerja, dan berbagai insentif.
3. **Karakteristik Agen Pelaksana.** Faktor ketiga dalam model implementasi yang menentukan keberhasilan kebijakan adalah karakteristik dari lembaga pelaksana. Hal ini mencakup adanya pengawasan yang jelas dalam pengambilan keputusan setiap badan pelaksana kebijakan. Selain itu diperlukan juga adanya komunikasi yang terbuka secara horizontal maupun vertikal yang bertujuan agar para pelaksana kebijakan memperoleh kebebasan yang menyeluruh untuk berkomunikasi, baik dengan sesama pelaksana maupun dengan masyarakat.
4. **Sikap Agen Pelaksana Kebijakan.** Seluruh elemen yang terdapat dalam lima model Implementasi kebijakan akan dievaluasi berdasarkan pandangan para implementor mengenai nilai-nilai tanggung jawab dan komitmen yang tercermin terhadap sikap mereka sebagai pelaksana kebijakan.
5. **Komunikasi Antara Organisasi dan Penguatan Kegiatan.** Komunikasi yang dilakukan antarorganisasi dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar aliran informasi dari berbagai sumber sehingga memudahkan pemahaman standar dan indikator kinerja. Saluran komunikasi yang efektif antar organisasi pelaksana akan mempengaruhi terhadap keberhasilan hingga kegagalan dari pelaksanaan kebijakan. Disamping itu diperlukan pula dukungan dari para pelaksana kebijakan untuk memastikan suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan. Aktivitas dukungan ini mencakup nasihat dan bantuan teknis, serta sistem penghargaan yang bersifat positif maupun negatif bagi para pelaksana kebijakan.
6. **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.** Aspek sosial, ekonomi, dan politik menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, keberadaan sumber daya ekonomi sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Demikian juga, aspek sosial harus diperhatikan, karena ini adalah kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan publik. Selain itu, lingkungan politik juga penting, di mana kelompok kepentingan di masyarakat harus dipertimbangkan baik dalam penyusunan kebijakan maupun saat pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pada judul yang telah disusun oleh penulis dan juga permasalahan yang terdapat pada judul tersebut, diperlukan tinjauan ke lokasi penelitian atau lapangan sehingga penelitian yang dilaksanakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dengan tujuan ingin mengetahui suatu keadaan yang terjadi secara langsung dengan mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan di dalam pembahasan. Sedangkan untuk penelitian deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang mempelajari objek sekitar dan sistem pemikiran atau tingkatan peristiwa yang terjadi pada saat itu.

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2023: 54), penelitian kualitatif membatasi ruang lingkup penelitian dengan memperhatikan tidak hanya variabel yang diteliti tetapi juga kondisi sosial secara keseluruhan yang sedang dianalisis. Karena itu, penelitian kualitatif akan membatasi cakupan penelitian.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, digunakan batasan penelitian. Batasan penelitian adalah area yang mencakup poin-poin isu yang bersifat umum. Dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian adalah sebuah informasi yang diperoleh dari situasi yang terjadi secara langsung, yang sudah difokuskan dalam permasalahan yang nantinya perlu dipecahkan. Maka dari itu berikut beberapa fokus yang perlu dianalisis dalam penelitian ini:

1. Upaya Dispusida dalam meningkatkan Minta Baca Masyarakat Kota Malang
 - a. Penyediaan dan Penguatan Infrastruktur Pocadi
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Petugas

2. Implementasi Kebijakan Program Pojok Baca Digital menggunakan teori implementasi kebijakan
 - a. Kebijakan dan Tujuan, keberhasilan suatu kebijakan memerlukan tujuan dan kriteria yang terdefinisi dengan baik.
 - b. Standar dan Sasaran Kebijakan, keberhasilan kebijakan perlu standar dan tujuan yang jelas
 - c. Sumber Daya, seperti Materi, ataupun Sumber Daya Manusia
 - d. Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan
 - e. Disposisi para agen pelaksana kebijakan, nilai tanggungjawab dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan
 - f. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, untuk memperlancar proses berjalannya informasi
 - g. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, merupakan faktor pendukung yang perlu diperhatikan

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat berikut: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang (DISPUSSIPDA).

1. Instansi Penelitian : Kantor Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang (DISPUSSIPDA)
2. Alamat Instansi : Jl. Besar Ijen No.30A, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
3. Telefon Istansi : 0341362005

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:104) Data Primer merupakan data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti. Data primer merupakan data yang belum termuat dalam data perusahaan atau belum digarap atau diolah. Data primer disatukan langsung dari sumber utamanya, hal tersebut terdiri wawancara, survey dan eksperimen.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh peneliti melalui pihak lain atau sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Sumber data dapat diperoleh dari berbagai sumber meliputi media lain, dokumentasi atau arsip dari individu lain, atau dari sumber yang berbeda. Data sekunder, menurut Bungin (2001:128), dapat mencakup dokumen, laporan, data pendaftaran, atau jenis informasi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode dalam pengumpulan data dalam penelitian akan menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan suatu penelitian Metode pengumpulan data dalam penelitian menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Bukan hanya siapa yang menjadi subjek penelitian, tetapi juga cara data dikumpulkan. Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Sugiyono (2017: 104), yang menyatakan teknik pengumpulan data menjadi tahap yang krusial dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang merupakan dasar utama dari suatu penelitian. Apabila peneliti tidak mengetahui metode untuk mengumpulkan data, maka data yang diperoleh tidak dapat memenuhi standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang paling umum. Wawancara, menurut Ahmad (2015: 62), adalah proses mendapatkan informasi melalui teknik tanya jawab langsung dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara. Tipe wawancara yang paling sederhana terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dibuat oleh peneliti kemudian disampaikan kepada individu yang disebut informan. Penelitian ini melibatkan Ibu Ir. Yayuk Hermiati, MH, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, serta Ibu Linda Desriwati, S.K.M., yang berperan sebagai Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan.

2. Observasi (Pengamatan)

Metode untuk mengumpulkan data yang dikenal sebagai observasi atau pengamatan berfokus pada peristiwa, alasan, atau aspek yang terjadi di suatu lokasi atau tempat penelitian yang berhubungan dengan studi yang dilakukan. Menurut Bandur (2016: 105), metode pengumpulan data kualitatif yang menggunakan observasi secara langsung sangat cocok untuk menemukan pola perilaku dan kejadian yang diperlukan untuk mempelajari masalah atau masalah penelitian secara lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Peneliti mendapatkan data sekunder dengan teknik dokumentasi. Informasi yang didapat dari dokumen atau sumber relevan yang tercatat serta hingga arsip yang relevan dengan topik penelitian dicatat untuk memperkuat dokumentasi. Ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2017: 124), yang menyatakan bahwa dokumentasi terdiri dari catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa karya gambar atau tulisan, seperti catatan harian, sejarah, atau biografi. Dokumentasi gambar dapat berupa foto saat melakukan penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldna (2014: 133) dalam (Sugiyono, 2023 cetakan ke 6) Analisis data terdiri dari proses mengumpulkan informasi, mengurangi jumlah data, menampilkan data, dan *drawing* atau memverifikasi kesimpulan. Berikut adalah penjelasan tentang tugas analisis data:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Dalam fase ini, pengumpulan data dan informasi dilakukan peneliti dari dari dokumen dan hasil wawancara. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian disatukan secara menyeluruh tanpa menghapus data yang diperoleh dari lapangan. Setelah itu, informasi tersebut dianalisis dengan cermat. Dalam penelitian ini, pengumpulan informasi berlangsung selama beberapa hari, bahkan bisa jadi berbulan-bulan, sehingga menghasilkan data yang beragam dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Reduction (Reduksi data)

Prakteknya, langkah ini adalah mereduksi data, yang berarti meragkum dan memilih data dari dokumentasi dan hasil wawancara untuk disederhanakan dan melakukan penyeleksian. Hal ini dilakukan untuk mengkonsentrasikan perhatian pada hal-hal yang penting dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Teori yang telah ditetapkan untuk mendukung hasil data dalam bahasan penelitian ini dihubungkan dengan data yang telah disederhanakan. Dari tahapan tersebut peneliti akan menulis atau menguraikan poin penting di setiap paragraph yang akan dicetuskan di dalam pembahasan dalam penelitian.

3. Data Display (Penyajian Data)

Pada fase penyajian data, peneliti akan menyampaikan data melalui penjelasan naratif yang berfokus pada inti permasalahan yang diteliti. Selain itu, setiap bagian pembahasan akan dijelaskan dengan cara menghubungkan satu sama lain, yang direkomendasikan dalam penyajiannya, dengan dukungan penggunaan tabel, grafik, atau gambar. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberi kemudahan peneliti untuk menjelaskan atau merinci data yang akan dipresentasikan. Penyajian data dari data yang diperoleh akan mempermudah memahami fenomena yang terjadi dan melakukan pekerjaan selanjutnya. Dengan pendekatan kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif, menurut Miles dan Huberman (1984: 137).

4. Conclusion dwawing/verification

Karena masih bersifat sementara, Kesimpulan yang disampaikan dalam awal dapat mengalami perubahan karena tidak didukung dengan bukti yang kuat saat proses pengumpulan data., menurut Miles dan Huberman (1984: 141). Menurut Sugiyono (2017: 142), hasil dari penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan baru. Temuan penelitian dapat memberikan penjelasan atau gambaran yang sebelumnya belum dipahami secara jelas menjadi lebih jelas setelah dilakukan penelitian.

Keabsahan data

Untuk mengukur kredibilitas penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan triangulasi data sebagai salah satu cara untuk melakukan validasi informasi. Terdapat beberapa jenis triangulasi meliputi Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Waktu. Menurut William Wiesma (1986) (dalam Sugiyono, 2023: 189), untuk menguji kepercayaan data, triangulasi mencakup pemeriksaan informasi dari berbagai sumber, metode, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keandalan informasi. Berbagai teknik atau cara pemeriksaan data digunakan untuk meneliti informasi yang telah diperoleh oleh peneliti guna mendapatkan kesimpulan yang kemudian mengarah pada permintaan kesepakatan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data dari penelitian literatur dan membandingkannya dengan proses wawancara dengan informan. Tujuan dari teknik triangulasi adalah untuk menjamin keandalan dari data yang diperoleh melalui penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Data yang kredibel sering dipengaruhi oleh waktu. Sebagai hasilnya, usaha untuk memeriksa keandalan data dapat dilakukan menggunakan teknik seperti wawancara, pengamatan, atau metode lainnya dalam berbagai kondisi waktu atau situasi. Dalam penelitian ini, pencarian informan dilakukan pada waktu istirahat setelah selesai melaksanakan shalat dzuhur, sehingga pada proses wawancara tidak memakan jam kerja seorang informan tersebut.

Dari ketiga Triangulasi tersebut dalam mendapatkan keabsahan data pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwa penerapakan teknik triangulasi sangat penting dalam upaya mengetahui keabsahan data dari sumber-sumber yang didapatkan, dari informan dan dari literaturm

Hasil dan Pembahasan

a) Upaya Dispusipda dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Malang

Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang telah berupaya untuk mendorong untuk menumbuhkan budaya baca masyarakat Kota Malang. Pojok Baca Digital adalah salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang untuk merangsang kegemaran membaca di antara penduduk. Tindakan yang diambil termasuk hal-hal berikut:

1) Penyediaan dan Penguatan Infrastruktur Pocadi

Penyediaan dan Penguatan Infrastruktur Pocadi dalam layanan perpustakaan digital merujuk pada proses pembangunan, pengadaan, dan peningkatan fasilitas fisik dan nonfisik yang mendukung pelaksanaan layanan informasi berbasis teknologi. Berdasarkan Sugiharto (2019), infrastruktur literasi digital adalah sekumpulan sarana, prasarana, dan sistem yang berfungsi untuk memberikan akses informasi dan pengetahuan secara efisien melalui teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, Wahyudi (2021) menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur perpustakaan digital meliputi pengoptimalan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, serta pengembangan Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi literasi. Dalam konteks Pocadi, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas, 2020) mengartikan Pojok Baca Digital sebagai layanan berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan akses literasi masyarakat dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer, tablet, dan aplikasi e-book, di mana keberlangsungan pelayanan sangat tergantung pada kesiapan serta kekuatan infrastruktur pendukung.

2) Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Petugas

Peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga kerja adalah aspek utama dari rencana untuk mengembangkan sumber daya manusia, yang bertujuan meningkatkan keterampilan, kemampuan, serta profesionalisme seseorang dalam melaksanakan tugas dengan baik. Berdasarkan penjelasan Horton et al. (2003), penguatan kapasitas merupakan langkah untuk memperkuat kapasitas individu, organisasi, dan sistem dalam meraih tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan, menurut Sedarmayanti (2017), peningkatan kapasitas aparatur meliputi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, Rivai & Sagala (2019) menegaskan bahwa peningkatan kemampuan staf tidak selalu terpusat pada keterampilan teknis, tetapi juga pada prinsip-prinsip pelayanan, kreativitas, dan hubungan dengan masyarakat.

b) Teori Implementasi Kebijakan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Nugroho (2017), Standar kebijakan berperan sebagai ukuran atau panduan yang digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditentukan. Pedoman ini menjadi referensi bagi pelaksana untuk mengevaluasi apakah proses pelaksanaan telah berlangsung secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di sisi lain, sasaran kebijakan menurut Nugroho adalah individu atau kelompok yang ingin dipengaruhi, dijangkau, atau mendapatkan keuntungan langsung dari kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks penelitian terkait Program Pojok Baca Digital (POCADI), sasaran kebijakan dapat mencakup masyarakat umum di Kota Malang serta mahasiswa yang membutuhkan akses bacaan yang berbasis digital. Kejelasan mengenai standar dan sasaran kebijakan adalah hal yang sangat krusial agar pelaksanaan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar memerlukan.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Pojok Baca Digital (POCADI), keberhasilan layanan sangat ditentukan oleh sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup bukan hanya kemampuan serta jumlah tenaga kerja yang mengelola POCADI, tetapi juga melibatkan kelengkapan perangkat seperti komputer, tablet, wifi, dan anggaran untuk perawatan serta pengembangan fasilitas. Pegawai atau penjaga POCADI berperan penting dalam membantu pengunjung memanfaatkan perangkat digital, sedangkan fasilitas dan teknologi yang tersedia berfungsi sebagai dukungan utama agar layanan dapat diakses dengan nyaman dan efektif. Lebih jauh, adanya anggaran yang cukup sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat selalu dalam kondisi baik dan koleksi digital dapat diperbaharui. Jika salah satu elemen sumber daya ini tidak optimal, layanan POCADI memiliki kemungkinan tidak beroperasi secara optimal. Sebab itu, penting untuk melakukan pengelolaan sumber daya secara menyeluruh agar POCADI bisa mencapai sasaran utamanya, yakni mempermudah masyarakat dan mahasiswa dalam mengakses bahan bacaan digital.

3. Karakter Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana pada Program Pojok Baca Digital (POCADI) berkaitan dengan keahlian, sikap, dan peran yang ada pada petugas yang memberikan layanan POCADI di lapangan. Dalam hal ini, petugas POCADI menjadi titik temu langsung bagi pengunjung, sehingga kemampuan mereka dalam menggunakan alat

digital, mengerti prosedur layanan, serta memberikan dukungan kepada masyarakat sangat memengaruhi suksesnya pelaksanaan program. Di samping aspek teknis, karakteristik pelaksana juga terlihat dalam sikap, keramahan, keterampilan komunikasi, serta dedikasi mereka dalam mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Ketika petugas menunjukkan responsif, sikap baik, dan memahami tujuan dari POCADI, pelayanan biasanya berlangsung lebih efisien dan dapat memenuhi harapan pengunjung. Namun, adanya keterbatasan dalam kemampuan teknis atau kurangnya pemahaman tentang aturan dapat mengganggu kualitas layanan. Oleh karena itu, karakteristik agen pelaksana dalam POCADI menggambarkan kemampuan teknis, disiplin, serta kesiapan petugas dalam melaksanakan kebijakan dengan lebih baik.

4. Disposisi. Agen Pelaksana Kebijakan

Disposisi atau sikap agen pelaksana kebijakan merujuk pada kecenderungan, kemauan, dan penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan yang mereka jalankan. Sikap ini meliputi komitmen, motivasi, tingkat penerimaan, serta sejauh mana pelaksana mendukung tujuan kebijakan tersebut. Ketika pelaksana memiliki sikap positif seperti antusias, peduli, dan memahami manfaat kebijakan maka proses implementasi cenderung berjalan lebih baik karena pelaksana menjalankan tugas dengan kesadaran dan tanggung jawab. Sebaliknya, jika pelaksana kurang bertanggung jawab, kurang memahami kebijakan, atau menunjukkan penolakan, maka implementasi dapat terhambat meskipun sumber daya dan struktur organisasi sudah mencukupi. Oleh karena itu, disposisi merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan, karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh peraturan dan sarana prasarana, tetapi juga oleh sikap dan dedikasi orang-orang yang melaksanakannya.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antara organisasi dan penguatan kegiatan pelaksana sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan program POCADI di lapangan. Pelaksanaan POCADI memerlukan kerjasama antara Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang serta petugas lapangan yang melayani masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang jelas tentang prosedur layanan, pembagian tugas, serta cara pemeliharaan fasilitas digital sangat membantu petugas dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apabila komunikasi berjalan dengan baik, petugas dapat memahami arahan, mengetahui tindakan yang harus diambil saat menghadapi masalah teknis, dan memberikan layanan sesuai standar. Sebaliknya, jika informasi tidak disampaikan dengan baik atau koordinasi antar bidang tidak konsisten, pelaksanaan kegiatan akan kurang terarah dan layanan kepada pengunjung dapat terganggu. Oleh karena itu, penguatan aktivitas pelaksana melalui evaluasi berkala, dan koordinasi yang baik antara individu sangat penting agar POCADI dapat berfungsi secara optimal sebagai layanan literasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Aspek sosial, ekonomi, dan politik mempunyai peran penting dalam pelaksanaan POCADI di Kota Malang. Dalam hal sosial, masyarakat di Kota Malang memiliki potensi yang cukup signifikan berkat lingkungan pendidikan yang kuat dan tingginya jumlah pelajar, tetapi tingkat minat baca belum merata, terutama di kalangan masyarakat pinggiran yang kurang memiliki literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota komunitas, terutama generasi muda, lebih memilih media sosial ketimbang bacaan, sehingga POCADI perlu menyediakan layanan yang lebih menarik dan mudah diakses untuk dapat bersaing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan data yang diperoleh oleh peneliti dan penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas terkait penelitian yang sudah dilakukan dengan judul Implementasi Kebijakan Program Pojok Baca Digital dalam Upaya Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Malang (Studi pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Usaha Dispusipda untuk Meningkatkan Ketertarikan Membaca Warga Kota Malang. Meningkatkan ketertarikan membaca warga Kota Malang berdasarkan hasil penelitian dan penilaian tentang Implementasi kebijakan POCADI untuk meningkatkan ketertarikan membaca warga di Kota Malang (Studi di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang), bisa ditarik kesimpulan bahwa Dispusipda Kota Malang telah menerapkan berbagai langkah strategis demi memperkuat literasi warga melalui inovasi layanan digital.
2. Implementasi Program. Pelaksanaan Kebijakan Program Pojok Baca Digital (POCADI) di Kota Malang sudah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai potensi maksimal. Ini terlihat dari adanya sarana digital seperti komputer, tablet, dan jaringan wifi yang digunakan secara efektif oleh masyarakat, khususnya mahasiswa yang memerlukan akses bacaan digital secara gratis. Tujuan dan standar kebijakan telah ditentukan dengan jelas, dan masyarakat yang menjadi target program mampu merasakan dampak positifnya.
3. Sumber Daya. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan POCADI dapat dikatakan mencukupi, namun belum sepenuhnya efisien. Beberapa anggota tim belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait dengan SOP layanan dan penggunaan perangkat digital. Walaupun begitu, dedikasi dan sikap proaktif dari para pelaksana

mencerminkan dukungan yang kokoh terhadap tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan minat baca di masyarakat.

4. Komunikasi antar Organisasi. Komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik, terlihat dari adanya pertemuan berkala, koordinasi teknis, serta instruksi yang disampaikan oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Meski demikian, komunikasi harus diperkuat saat terjadi peningkatan jumlah pengunjung atau masalah teknis yang memerlukan solusi segera.
5. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Faktor sosial, ekonomi, dan politik menjadi salah satu sumber yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pada sisi sosial, tingkat literasi masyarakat masih rendah dan banyak orang lebih aktif di media sosial dibandingkan dengan aktivitas membaca buku. Dari segi ekonomi, POCADI menawarkan manfaat yang signifikan bagi individu berpenghasilan rendah sampai menengah dengan menyediakan akses bacaan secara cuma-cuma. Dalam konteks politik, dukungan dari pemerintah lokal menjadi faktor penting, tetapi stabilitas dan kontinuitas anggaran bisa terancam berubah ketika terdapat pergeseran dalam kepemimpinan atau prioritas program yang berbeda.

Saran

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa rekomendasi yang akan dijelaskan mengenai permasalahan Implementasi Kebijakan Program Pojok Baca Digital untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Malang (Studi pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang), berikut adalah saran dari peneliti:

- 1) Ketidak responsifan sejumlah pegawai menjadi masalah, sehingga Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang harus menjalankan pelatihan secara berkala dan evaluasi rutin untuk semua petugas POCADI. Pelatihan tersebut tidak hanya akan menekankan pada keterampilan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga pada etika pelayanan dan kemampuan berkomunikasi.
- 2) Permasalahan kurang responsifnya beberapa petugas maka Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang perlu melakukan pelatihan rutin dan evaluasi berkala kepada seluruh petugas POCADI. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis penggunaan perangkat digital, tetapi juga pada sikap pelayanan, dan komunikasi. Evaluasi kinerja juga dapat dilakukan melalui kotak saran atau survei kepuasan pengunjung, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan perbaikan. Dengan peningkatan kapasitas dan komitmen petugas, kualitas pelayanan akan lebih konsisten dan dapat mendorong kenyamanan serta minat baca masyarakat.
- 3) Kendala Jaringan wifi yang tidak stabil dan perangkat komputer yang sering mengalami eror maka perlu adanya perawatan dan pengecekan teknis secara rutin terhadap seluruh fasilitas POCADI. Dinas dapat bekerja sama dengan pihak teknis atau penyedia layanan internet untuk memastikan jaringan tetap stabil dan mampu mendukung kebutuhan pengunjung. Petugas juga sebaiknya diberikan pelatihan dasar mengenai penanganan gangguan teknis ringan sehingga tidak selalu bergantung pada teknis.
- 4) Dengan melihat kondisi fasilitas yang kurang terawat seperti tempat duduk yang berlumut dan lingkungan yang kurang bersih, maka perlu dilakukan perbaikan sarana dan penataan ulang ruang POCADI agar lebih nyaman dan menarik. Dinas dapat melakukan pengecatan ulang. Selain itu, perlu dibuat jadwal piket kebersihan yang terstruktur serta pengawasan rutin untuk menjaga kebersihan area dari sampah daun atau kotoran lainnya. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan memberikan nilai tambah dari masyarakat dan dapat meningkatkan keinginan untuk datang lagi.
- 5) Dengan melihat beberapa permasalahan yang terjadi maka peneliti merekomendasikan ide baru yang bisa diterapkan yaitu "*Pocadi Goes to Community*" kegiatan literasi digital yang dilakukan secara berkala dengan menggandeng sekolah atau mahasiswa di Kota Malang, aktif melakukan sosialisasi dan membuat event atau lomba literasi digital. Dengan adanya inovasi ini, implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca secara lebih luas dan membuat Pocadi lebih dikenal serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang.

Daftar Pustaka

- Lindgren, I., & van Veenstra, A. F. (2018, May). Digital government transformation: a case illustrating public e-service development as part of public sector transformation. In *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age* (pp. 1-6).
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government information quarterly*, 32(3), 221-236.
- Twizyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government—A literature review. *Government information quarterly*, 36(2), 167-178.
- Bandur, A. (2016). Penelitian kualitatif: metodologi, desain, dan teknik analisis data dengan Nvivo 11 Plus. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Emzir, M., & Pd, M. (2012). Metodologi penelitian kualitatif analisis data. *Jakarta: Raja Grafindo*.

- Ahmad, J. (2015). Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi.
- Bungin, B. (2001). Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya. *Airlangga University Press*. Cope, J. (2011). *Entrepreneurial learning from failure: an intrepretative phenomenological analysis. Journal of Business Venturing*, 26(6), 604-623.
- Handoyo, eko. (2012). *Kebijakan publik*.
- John W. Creswell. (2008). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications. Hlm.46
- Sugiyono, S. (2013). Metode penelitian kualitatif. bandung: Alfabeta. *Google Scholar Alfabeta*.
- Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan *Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn*. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78.
- D. Krashen, S. (2004). *The Power Of Reading*.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (2013). Implementations. *Choice Reviews Online*, 50(11), 50-5912-50–5912.
- Riant, N. D. (2009). Public Policy Edisi Kedua. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Krashen, S. D. (2004). *The Power of Reading: Insights from the Research*. Libraries Unlimited.
- Wulan, Ratna. 2010. “The Role Of Intelligence, Vocabulary Knowledge, Attitudes, and Interest on Children’s Reading Comprehension” *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran*. Volume 14 Nomor 2. Hal. 166-185.
- Manning, L. (2011). *The Importance of Reading in Education*. *Journal of Education and Learning*, 15(3), 88-97.
- Rakhman, P.A., & Ramadhanti, T.P. (2023). *Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Membaca Peserta Didik Melalui Gerakan Literasi Sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 12(2), 154-166.
- Saepudin, E., Sukaesih, S., & Rusmana, A. (2017). Peran taman bacaan masyarakat (TBM) bagi anak-anak usia dini. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 5(1), 1-12.
- Fajriansyah, M., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2022). Implementasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi Kasus tentang Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Unisma Malang). *Respon Publik*, 16(9), 85-92.
- Latifah, A. N., & Sa’diyah, H. (2024). Strategi Pengelolaan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Di Era Digital. *TADWIN: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(2), 115-125.
- Kasmad. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Kedai Aksara.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Wahab, S.A. (2020). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (4th ed.). SAGE Publications.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk Teknis Program Pojok Baca Digital (Pocadi)*. Jakarta: Perpustnas RI.
- Sugiharto, B. (2019). *Manajemen Infrastruktur Literasi Digital di Era Informasi*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(2), 101–112.
- Wahyudi, R. (2021). *Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Layanan Perpustakaan Digital Daerah*. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 7(1), 45–58.
- Nugroho, A. (2022). *Inovasi dan Penguatan Infrastruktur Layanan Publik Digital di Sektor Pendidikan dan Literasi*. *Jurnal Administrasi Publik dan Inovasi Pelayanan*, 4(3), 77–89.
- Putra, D. A., & Rahmawati, L. (2021). *Digitalisasi Perpustakaan sebagai Upaya Penguatan Literasi Informasi di Era 4.0*. *Jurnal Transformasi Perpustakaan*, 9(2), 33–41.
- Kusuma, H. (2020). *Literasi Digital dan Kesiapan Infrastruktur di Lembaga Pendidikan dan Masyarakat*. *Jurnal Literasi dan Teknologi*, 3(1), 55–64.
- Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. (2024). *Laporan Kinerja Program Pojok Baca Digital Kota Malang Tahun 2024*. Malang: DISPUSSIPDA.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2018). *Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Panduan Implementasi Nasional*. Jakarta: Perpustnas RI.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., & Watts, J. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organizations*. Ottawa: International Development Research Centre (IDRC).
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.

- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Handoko, T. H. (2018). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugroho, A. (2022). *Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi Layanan Publik Berbasis Digital*. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Pelayanan Publik*, 4(2), 67–78.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk Teknis Program Pojok Baca Digital (Pocadi)*. Jakarta: Perpustnas RI.
- Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. (2024). *Laporan Kinerja Program Pojok Baca Digital Kota Malang Tahun 2024*. Malang: DISPUSSIPDA.
- Kurniawan, D. (2021). *Strategi Pengembangan SDM Perpustakaan di Era Transformasi Digital*. *Jurnal Pustaka Nusantara*, 5(1), 12–25.